

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR
39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM
SIAMIN DUKCAPIL DI KOTA TANJUNG BALAI**

TUGAS AKHIR

Oleh:

TIARA PANJAITAN
2103100017

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Tiara Panjaitan
NPM : 2103100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun
2020 Tentang Penerapan Program Siamin Dukcapil di
Kota Tanjungbalai
Medan, 15 November 2024
Pembimbing

Agung Saputra, S.Sos., M.AP
NIDN: 0120018303

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 0050017402

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Tiara Panjaitan
NPM : 2103100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ida Martinelly, SH., MM

PENGUJI II : Syafruddin, S.Sos, MH

PENGUJI III : Agung Saputra, S.Sos., M.AP

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Tiara Panjaitan**, NPM 2103100017, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 Oktober 2025

Yang Menyatakan,


METRAY
TEMPEL
088ANX105249533

Tiara Panjaitan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Program SIAMIN DUKCAPIL di Kota Tanjung Balai”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi yaitu cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda Saprun Panjaitan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan doa

hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Dan pintu surgaku, Ibunda Nurainun. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang diberikan, terimakasih atas kesabaran hati dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat, terimakasih sudah menjadi tempat untuk pulang. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Agung Saputra, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak/ Ibu Dosen Beserta Seluruh Jajaran pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Kepada seluruh Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang telah membantu penulis dalam hal informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada saudara kandung, kakak tersayang Irma Panjaitan, S.Pd yang sejak awal menjadi panutan, terimakasih karena telah menjadi sosok yang kuat dan menjadi tempat belajar. Adik tercinta Salwa Aulia Panjaitan yang sangat penulis sayangi, yang menjadi warna dalam hidup penulis, terimakasih karena selalu memberi semangat lewat tawa-tawa sederhana terimakasih untuk motivasi dan selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, angkatan 21 Ilmu Administrasi Publik yang telah menjadi saksi dan bagian dari perjalanan panjang penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada PK IMM FISIP UMSU, rasa hormat dan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa

Muhammadiyah yang telah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan. Di tempat inilah penulis belajar arti tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, dan pengabdian tanpa pamrih. Setiap proses, tawa, lelah, dan kebersamaan menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang sudah ditanamkan oleh ikatan ini terus tumbuh dalam diri penulis, dan menjadi bekal dalam menghadapi dunia yang lebih luas.

13. Kepada sahabat-sahabat tercinta, tempat bercerita, berkeluh kesah dan sumber semangat yang tak habis-habis. Kepada Sri Wahyuni , Puja Annisa Panjaitan, Khairunnisa, Dewi Sartika Sari, Dan Chiqa Faradhiba Putri Montoya. Terimakasih dari lubuk hati terdalam karena sudah saling menguatkan. Kalian bukan cuman sahabat tapi bagian tak terlupakan dari perjalanan hidup penulis. Skripsi ini menjadi bukti kecil bahwa dukungan dan doa kalian tidak pernah sia-sia, dan semoga persahabatan ini terus terjaga, hingga waktu yang tak terhingga.
14. Kepada kamu yang penulis sebut dengan panggilan “Mas” Terimakasih karena telah hadir bukan hanya sebagai kekasih, tapi juga sebagai sahabat, pendengar, penyemangat, sekaligus tempat untuk pulang saat dunia terasa terlalu ramai. Kamu tidak hanya mendukung dari jauh tapi juga berjalan bersama.
15. Teruntuk diri sendiri Tiara Panjaitan, terimakasih karena telah terus bertahan, terus belajar, terus tumbuh. Bahkan di saat dunia seakan tak berpihak kamu tetap memilih untuk mencoba lagi. Tak semua hari mudah

tapi kamu tetap ada, tetap hidup, tetap percaya. Untuk langkah kecil yang tetap kamu ambil walau hati penuh ragu, untuk tidak menyerah meski ada banyak alasan untuk berhenti, untuk luka yang tak terlihat, air mata yang disembunyikan dan doa yang dibisikkan dalam diam. Terimakasih karena tetap memilih bangkit dan terus melangkah.

Akhir kata sebagai penutup penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Medan, 26 juni 2025

Penulis

Tiara Panjaitan
NPM.2103100017

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM SIAMIN DUKCAPIL DI KOTA TANJUNG BAILAI

TIARA PANJAITAN

NPM : 2103100017

ABSTRAK

Program SIAMIN Dukcapil mencakup layanan pendaftaran penduduk, pengeluaran dokumen kependudukan seperti KTP, Akta kelahiran, Akta kematian, serta penyuluhan tentang pentingnya administrasi kependudukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan mempercepat proses layanan. Namun ternyata peneliti menemukan adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang program ini, sebab masih kurangnya sosialisasi pemerintah tentang program tersebut yang mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum mempunyai dokumen penting seperti , KTP , KK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan program SIAMIN dukcapil di Kota Tanjung balai. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah implementasi, dan kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dapat di lihat dari keberhasilan implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2020 telah diterapkan dengan cukup efektif dan menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya, masih kurangnya sosialisasi tentang penggunaan program aplikasi SIAMIN kepada masyarakat. Dalam hal implementasi SIAMIN dilaksanakan dengan pedoman dan arahan yang jelas, memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun perlu penambahan waktu kerja dan kelengkapan sarana dan prasarana agar operasional sistem berjalan dengan optimal. Komunikasi antar organisasi baik secara vertikal maupun horizontal sudah berjalan dengan cukup baik di lingkungan internal dinas, tapi koordinasi lintas instansi, khususnya dengan kelurahan dan instansi pusat masih perlu di tingkatkan guna mendukung sinkronisasi dan integritas data kependudukan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program SIAMIN, Administrasi kependudukan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Konsep Implementasi.....	8
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.1.2 Manfaat Implementasi Kebijakan.....	11
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	13
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.2.2 Proses Kebijakan Publik.....	15
2.2.3 Fungsi Kebijakan Publik.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Definisi Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	23
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	29
3.9.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungbalai.....	29
3.9.2 Tugas dan Fungsi.....	30
3.9.3 Visi dan Misi.....	31
3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Balai.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Penyajian Data.....	34
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	37
4.2 Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Simpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	35
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur	35
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	36
Tabel 4.4 Distribusi Menurut Pekerjaan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	21
Gambar 3.2 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan judul skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Lampiran X	: Surat Selesai Penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
Lampiran XI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XII	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XIII	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XIV	: LoA (Letter of Acceptence)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era digitalisasi pelayanan publik, pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk transformasi digital di sektor administrasi kependudukan adalah penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terintegrasi SIAMIN oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). SIAMIN merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi seperti perekaman e-KTP (elektronik), pembuatan KK (Kartu Keluarga), akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya.

Adapun si Amin (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dukcapil merupakan suatu program inisiatif dari pemerintah khususnya untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen-dokumen penting secara online, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kota Tanjung Balai.

Program SIAMIN Dukcapil mencakup layanan pendaftaran penduduk, pengeluaran dokumen kependudukan seperti KTP, Akta kelahiran, Akta kematian, serta penyuluhan tentang pentingnya administrasi kependudukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan mempercepat proses layanan. Namun ternyata peneliti menemukan adanya masyarakat

yang belum mengetahui tentang program ini, sebab masih kurangnya sosialisasi pemerintah tentang program tersebut yang mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum mempunyai dokumen penting seperti , KTP , KK.

Kota Tanjungbalai, sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, telah mulai mengimplementasikan SIAMIN sejak 2020 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat waktu pelayanan, serta meminimalisir praktik pungutan liar (pungli). Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi SIAMIN di Tanjungbalai tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi digital masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Dukcapil. Selain itu, belum meratanya sosialisasi mengenai penggunaan SIAMIN juga menjadi kendala yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur penggunaan sistem tersebut. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital.

Di Kota Tanjungbalai, implementasi SIAMIN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi permasalahan birokrasi yang rumit dan pelayanan yang terkadang belum optimal. Penelitian yang dilakukan di beberapa kota lain serupa menunjukkan bahwa kendala utama pada tahap awal implementasi

sistem informasi tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas terkait penggunaan sistem, serta resistensi terhadap perubahan dari prosedur konvensional ke sistem digital. Temuan-temuan ini juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang menyeluruh dan pelatihan intensif bagi sumber daya manusia agar proses transisi ke sistem digital dapat berjalan dengan lancar.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen-dokumen penting juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi penerapan program SIAMIN DUKCAPIL masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan pentingnya mengurus dokumen kependudukan seperti KK dan KTP hal ini menyebabkan data kependudukan yang ada dalam sistem menjadi tidak lengkap dan tidak akurat.

Salah satu faktor yang dapat menghambat implementasi dan penerapan sistem Si AMIN adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Seperti Keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas terkait penggunaan sistem. Dalam hal ini, kapasitas sumber daya manusia yang belum terkelola secara optimal serta keterbatasan kemampuan dalam pemanfaatannya menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya keterampilan teknis dan pengetahuan dalam menggunakan serta mengelola sistem SIAMIN mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, kurangnya pemahaman dari berbagai pihak terkait baik dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak pelaksana program terhadap tujuan dan manfaat jangka panjang dari program SIAMIN juga turut memperlambat proses implementasi. Ketika tujuan program tidak dipahami dengan baik, maka partisipasi dan dukungan yang seharusnya mendukung kelancaran penerapan sistem menjadi lemah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, pelatihan teknis, serta sosialisasi mengenai pentingnya sistem ini perlu menjadi prioritas agar Si AMIN dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Koordinasi antar instansi merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan kelemahan koordinasi masih sering terjadi. Salah satu permasalahan umum adalah kurangnya sinkronisasi data antarinstansi, yang menyebabkan terjadinya perbedaan informasi, keterlambatan pelayanan, serta munculnya hambatan dalam pelaksanaan program. Koordinasi yang tidak efektif juga berakibat pada rendahnya efisiensi pelayanan publik, karena masing-masing instansi berjalan secara sektoral dengan sistem dan database yang terpisah. Padahal, dalam era digital saat ini, integrasi data merupakan kebutuhan mendesak agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan program-program berbasis data kependudukan, seperti bantuan sosial, identifikasi hukum, pendidikan, dan kesehatan, dapat berjalan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Lebih jauh, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tantangan dalam pemanfaatan teknologi seperti infrastruktur belum memadai menjadi kendala dalam implementasi penerapan si AMIN, Teknologi informasi membantu kita mendapatkan, menyimpan, dan mengolah informasi dengan cepat dan mudah. Informasi yang akurat dan terkini ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Data kependudukan merupakan aset yang sangat berharga. Teknologi informasi berperan penting dalam memastikan data ini dikelola dengan baik, akurat, dan aman. Dengan demikian, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memastikan data kependudukan yang akurat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Berdasarkan pemaparan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan ilmiah dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM SI AMIN DUKCAPIL DI KOTA TANJUNG BALAI”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi penerapan program SIAMIN DUKCAPIL di Kota Tanjung balai?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dalam suatu penelitian. Maka yang menjadi tujuan penulis di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “bagaimana penerapan program Si Amin dukcapil di Kota Tanjung balai”

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan karya ilmiah di bidang administrasi publik serta pandangan penulis.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi mahasiswa untuk studi selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian. Manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan pengertian implementasi, manfaat implementasi, pengertian kebijakan publik, proses kebijakan publik, dan fungsi kebijakan publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah diteliti oleh penulis

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat di hubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau Masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Menurut van Meter dan van Horn dalam (Gumay, 2021) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan-kebijakan publik yakni: Pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Misalnya, keberhasilan implementasi kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan akan berbeda dengan kebijakan untuk menanggulangi kenakalan remaja. Kedua, faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Implementasi akan berjalan efektif bila

ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Menurut (Akib, 2010) implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Selanjutnya menurut (Utara & Minahasa, 2018) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga

merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut (Larasati & Hartono, 2024) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy proces) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Implementasi kebijakan, Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi bertujuan untuk menerjemahkan kebijakan yang bersifat konseptual

menjadi tindakan nyata yang dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.2 Manfaat Implementasi kebijakan

Manfaat dari implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan yang direncanakan dengan baik memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi memungkinkan berbagai langkah strategis diterapkan secara konsisten, sehingga hasil kebijakan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan harapan.

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Fajarwati & Rahmadilla, 2022) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :
- a. Kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
 - b. Tipe manfaat pada point ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai.
 - d. Letak pengambilan keputusan Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan

suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

- e. Pelaksanaan program dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2.2 Konsep kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan.

Chandler dan Plano dalam (Pandoh et al., 2015) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Sedangkan menurut Dunn dalam (Duval, 2018) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis.

Menurut Friedrich dalam (Ananta & Syamsir, 2019) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu Wilson menurutnya kebijakan adalah sebagai seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang memiliki perbedaan makna dengan administrasi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensi, kebijakan publik melibatkan berbagai tahapan mulai dari identifikasi masalah,

perumusan tujuan, pemilihan tindakan, hingga evaluasi akhir. Kebijakan publik mempunyai pemanfaatan strategis sumber daya untuk menyelesaikan masalah publik, termasuk investasi berkelanjutan untuk mendukung masyarakat, serangkaian pilihan di buat lembaga atau pejabat pemerintah untuk tujuan tertentu tindakan yang di usulkan dengan menghitung hambatan dan peluang, rencana atau aksi dengan tujuan politik yang berbeda dari administrasi.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah di formulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan dan hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut.

Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses tahapan yang cukup panjang. Thomas R.Dye dalam (RENNI, 2014) mendefenisikan proses kebijakan dalam beberapa tahapan di antaranya :

1. Identifikasi Masalah kebijakan, tahap ini menandai awal dari proses pengungkapan masalah sosial. Melalui pengamatan mendalam

terhadap kondisi masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik, kita berusaha mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selanjutnya, berbagai elemen masyarakat, seperti individu, organisasi non-pemerintah, media, dan kelompok kepentingan, berperan aktif dalam menyuarakan masalah-masalah tersebut ke permukaan. Setelah masalah-masalah teridentifikasi, kita perlu melakukan evaluasi untuk menentukan apakah masalah tersebut cukup signifikan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

2. Penyusunan Agenda ada tahap ini, memilih dan menentukan masalah-masalah yang akan menjadi prioritas penanganan. Tidak semua masalah dapat diselesaikan sekaligus, sehingga diperlukan seleksi yang ketat. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk urgensi masalah, kepentingan politik, dan tekanan dari berbagai pihak.
3. Peumusan kebijakan Pada tahap ini, berbagai pihak mulai merancang solusi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Proses ini melibatkan pemerintah, para ahli, dan masyarakat luas.
4. Pengesahan kebijakan merupakan tahap di mana sebuah kebijakan resmi disahkan melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, atau badan lainnya. Proses ini seringkali melibatkan negosiasi politik yang intens antara v berbagai aktor, seperti partai politik dan kelompok kepentingan,

untuk mencapai kesepakatan.

5. Implementasi kebijakan tahap pelaksanaan kebijakan merupakan proses penerjemahan kebijakan yang telah disahkan menjadi tindakan nyata. Lembaga eksekutif dan administrasi publik berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini, melibatkan berbagai instansi pemerintah, dan mengelola sumber daya yang tersedia
6. Evaluasi Kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Dari beberapa uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik serangkain proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau timbul di masyarakat. Dari uraian diatas terdapat tahapan yang bisa dikatakan sangat penting dalam proses kebijakan publik, tahapan tersebut ialah implementasi kebijakan. karena dengan implementasi, kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

2.2.3 Fungsi Kebijakan Publik

Fungsi kebijakan publik sangat penting dalam kehidupan bernegara karena kebijakan publik menjadi alat utama pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola masyarakat. Berikut :

1. Regulasi (Regulatory Function) Fungsi ini berkaitan dengan penetapan aturan, norma, atau standar untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau institusi.
2. Alokasi (Distributive Function) Fungsi ini berfokus pada penyediaan dan alokasi sumber daya publik seperti dana, infrastruktur
3. Pelayanan Publik (Service Provision Function) Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan langsung layanan dasar kepada masyarakat.
4. Partisipasi dan Pemberdayaan (Participation and Empowerment Function) Fungsi ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan serta memberdayakan mereka untuk lebih mandiri dan aktif.

Menurut Irfan Islamy dalam (A et al., 2019) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Menurut thomas R Dye sebagaimana dikutip dalam (Kholif et al., 2019) mengatakan bahwa kebijakan publik apapun yang dipilih pemerintah Dilakukan. Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang memiliki implikasi bagi seluruh masyarakat. Kebijakan ini dapat berbentuk aturan, program, atau tindakan nyata yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik atau mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik adalah hasil dari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

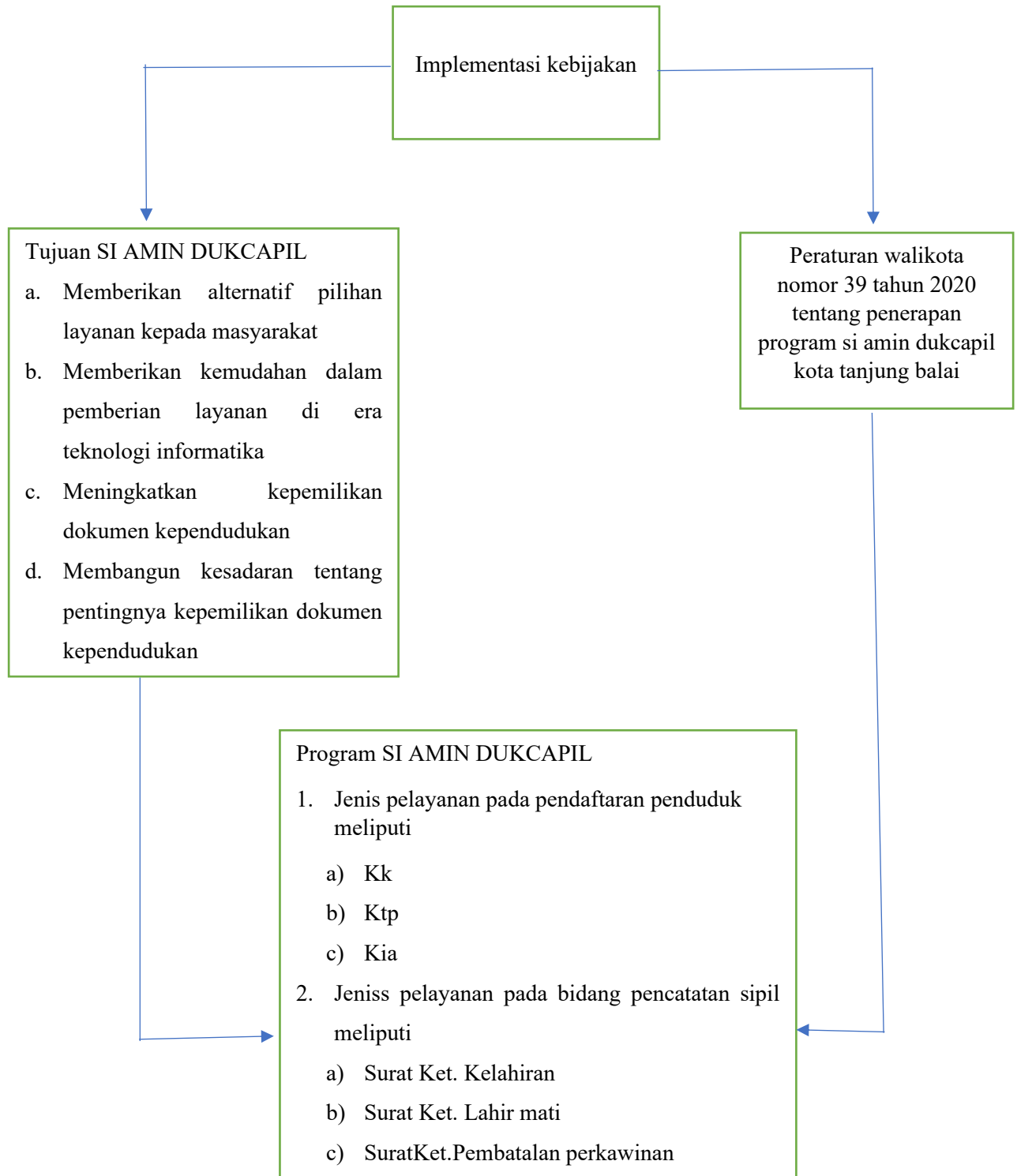
3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini, penulis berusaha mendapatkan gambaran yang sistematis dan jelas tentang fenomena yang berkaitan dengan topik yang di bahas.

(Moleong, 2006) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Sehingga tidak diperkenankan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.

Penelitian ini di pilih karena bersifat menyeluruh, dinamis dan menggenaralisasi. Hal ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melihat bagaimana implementasi penerapan program si AMIN DUKCAPIL di kota tanjung balai yang merupakan suatu fenomena sosial dimana membutuhkan informasi secara menyeluruh dan mendalam dari masing-masing informan kunci maupun utama agar dapat dilihat dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka konsep

3.3 Defenisi Konsep

1. Implementasi kebijakan Pemahaman tentang implementasi dapat di hubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau Masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.
2. Kebijakan publik adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk menajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan.
3. Program SI AMIN DUKCAPIL adalah suatu program inisiatif dari pemerintah khususnya untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen-dokumen penting secara online, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kota Tanjung Balai.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Dalam penelitian ini melihat pelayanan melalui penjabaran kategorisasi penelitian. Adapun kategorisasi penelitian ini di dasari oleh pendapat menurut van meter dan van horn diantaranya :

1. Standar dan tujuan kebijakan : kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur agar dapat di pahami dengan baik oleh para pelaksana
2. Sumber daya : Impelementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang mencakup anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang memadai
3. Komunikasi antar organisasi : Komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman.
4. Karakteristik agen pelaksana : setiap orang dalam organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing masing.
5. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi : Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, stabilitas politik, dan dukungan sosial dapat memengaruhi efektivitas kebijakan.
6. Sikap dan Komitmen Pelaksana – Dukungan, pemahaman, dan kesiapan aparatur dalam melaksanakan kebijakan sangat menentukan keberhasilannya.

3.5 Narasumber

Menurut (Sudiyono, 2021) narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh penanya dalam kegiatan wawancara. Narasumber merupakan orang ahli di bidangnya yang mampu menguraikan jawaban dengan benar dan logis, dan akurat sesuai pokok bahasan yang di bahasnya. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini, merupakan orang yang memberikan informasi kepada penelitian dan orang yang mampu atau mengetahui informasi tentang program SIAMIN dukcapil Kota Tanjung balai.

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Nama : Neny Ratika Syari, SH.M.AP

Umur : 43 Tahun

Jabatan : Analisis kebijakan ahli muda

2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Nama : Ferawati, SE

Umur : 46 Tahun

Jabatan : Analisis kebijakan ahli muda

3. Bidang Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data

Nama : Herlin, A.Md

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Administrator Database

4. Kelurahan Selat lancang

Nama : Tuti Rahayu Zubir, SKM

Umur : 47

Jabatan : Lurah

5. Kelurahan Selat Lancang

Nama : Arif Pribadi

Umur : 43

Jabatan : Masyarakat

3.6 Teknik pengumpulan data

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang akan menentukan pada bagaimana hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, dengan pengumpulan data maka upaya untuk menganalisanya dapat dilakukan. Pengumpulan data juga merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung ditempat penelitian, melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang menjadi objek penelitian.

a) Wawancara, yaitu dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat, Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui percakapan dengan narasumber, baik terstruktur maupun tidak. Berikut adalah teknik wawancara yang digunakan :

1. Berdasarkan terstruktur

- Pertanyaan disiapkan matang.
- Urutan pertanyaan sistematis.

2. Cara pelaksanaan

- Tatap Muka: Interaksi langsung, observasi

b) Observasi, Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan ada tujuan yang ingin dicapai.

2. Data skunder

Dalam data skunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan data yaitu :

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari buku-buku karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan di teliti
- b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang di peroleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

3.7 Teknis Analisis data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Inti dari analisis data baik dalam penelitian kualitatif, mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda beda.

Menurut (Huberman & Miles, 1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verivication*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan,

maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*verivication*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Lokasi dan waktu penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, Jl. M.T. Haryono No. 46, Karya, Tanjungbalai selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dengan perkiraan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2025.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjungbalai



Gambar 3.2 Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai, sebagai instansi pemerintah daerah, bertugas menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tugas utamanya mencakup pelayanan dokumen seperti KK, KTP Elektronik, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan KIA. Guna meningkatkan kualitas layanan, Disdukcapil Tanjungbalai mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi, termasuk aplikasi SIAMIN DUKCATPIL untuk memudahkan akses layanan daring bagi masyarakat.

3.9.2 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 41 Tahun 2016, berikut adalah tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai:

a. Tugas Pokok

Disdukcapil Kota Tanjungbalai bertanggung jawab utama untuk mengoordinasikan, merencanakan, memberikan pembinaan teknis, melakukan pengawasan dan pengendalian, serta merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di sektor kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tanjungbalai mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut

1. Merumuskan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Memberikan pembinaan teknis terkait penyelenggaraan tugas kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Mengendalikan pelaksanaan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil.

3.9.3 Visi dan Misi

a. Visi

Adapun visi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjung balai Terwujudnya Data Penduduk yang Akurat serta Masyarakat yang Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan.

b. Misi

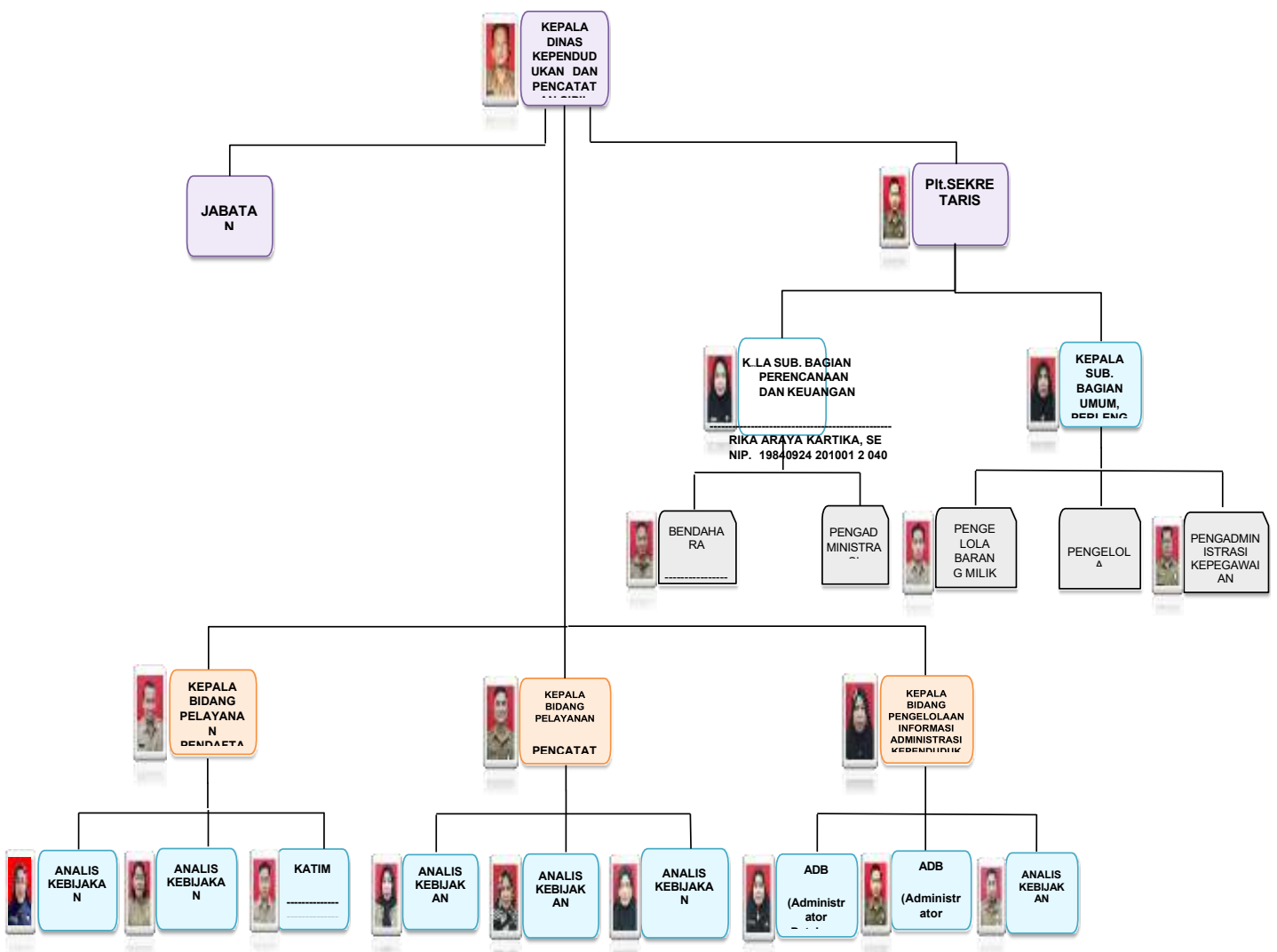
1. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur disdukcapil

4. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dan berbasis teknologi.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Visi dan misi Disdukcapil Kota Tanjungbalai selaras dengan arah pembangunan Kota Tanjungbalai dalam RPJMD 2021–2026, yaitu "Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah, dan Harmonis." Komitmen Disdukcapil adalah mendukung visi kota melalui pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan berbasis teknologi informasi

3.9.4 Struktur Organisasi Dinas kependudukan pencatatan sipil Kota Tanjungbalai.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI



Gambar 3.3 struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjungbalai

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyajian Data

Bab ini menyajikan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan 5 narasumber berwenang. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 mengenai program SIAMIN DUKCAPIL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Penulis mengelompokkan narasumber berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan dan jabatan/status. Data hasil wawancara diolah melalui reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan pengelompokan tersebut. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber menurut jenis kelamin dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 disajikan frekuensi dan persentase narasumber menurut jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase%
1	Laki-Laki	2	40%
2	Perempuan	3	60%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa narasumber yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang atau 40% dan perempuan sebanyak 3 orang atau 60%.

2. Distribusi Narasumber menurut umur

Distribusi menurut umur yang akan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Distribusi narasumber menurut umur

No	Nama	Umur
1	Tuti Rahayu Zubir, SKM	47 Tahun
2	Arif Pribadi	43 Tahun
3	Ferawati, SE	46 Tahun
4	Neny Ratika Syari, SH.M.AP	43 Tahun
5	Herlin, A.Md	42 Tahun

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa rentang umur narasumber di antara 42 tahun hingga 47 tahun.

3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Narasumber yang diwawancarai dikategorikan berdasarkan pendidikan yang di kelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu : S2 , S1 ,D3, dan SMA. Pada tabel 4.3 disajikan frekuensi dan prasantase narasumber menurut pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Distribusi narasumber menurut pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Prasantase%
1	S2	1	20%
2	S1	2	40%
3	D3	1	20%
4	SMA	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diliat bahwa tingkat pendidikan narasumber pada tingkat S2 sebanyak 1 orang atau 20% , S1 sebanyak 2 orang atau 40%, D3 sebanyak 1 orang atau 20% dan SMA sebanyak 1 orang atau 20%.

4. Distribusi Narasumber menurut pekerjaan

Pengelompokkan narasumber untuk penelitian ini didasarkan pada bidang pekerjaan. Adapun tabel 4.4 yang akan menyajikan frekuensi dan persentase narasumber menurut pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 4.4 distribusi narasumber menurut pekerjaan

NO	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase%
1	Pegawai negeri sipil	4	80%
2	Wiraswasta	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : hasil penelitian 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat di ketahui bahwa narasumber yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 4 orang atau 80% dan narasumber yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 1 orang atau 20%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Adapun indikator keberhasilan dari implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan program SIAMIN DUKCAPIL di kota tanjungbalai sebagai berikut :

1. Standar dan tujuan kebijakan

Standar kebijakan berfungsi sebagai tolak ukur atau kriteria yang mendasari penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Adapun tujuan kebijakan adalah arah atau hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur agar dapat di pahami dengan baik oleh para pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak herlin, A.Md selaku administrator database di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data bahwa :

“Para pelaksana sudah memahami tujuan kebijakan SIAMIN yang telah di tetapkan, tujuan kebijakan si amin telah di sampaikan kepada para pelaksana sebelum program ini di

jalankan setelah di sampaikan tujuan dan manfaat nya siamin mudah-mudahan para pelaksana dapat mengerti dan memahaminya”

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Ferawati, SE selaku analisis kebijakan ahli muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa :

“program yang kami buat sudah sangat jelas dengan tujuan kebijakan, intinya kami mau layanan kependudukan jadi lebih bagus buat masyarakat. Ini berarti e-ktip jadi lebih ngebut, data penduduk lebih tepat, dan kita dapat layanan yang cepat, gampang, dan tidak tertutup-tutupi.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Nenry Ratika Syari, SH.M.AP selaku analisis kebijakan ahli muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa :

“para pelaksana di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sangat paham dengan tujuan kebijakan SIAMIN, kami tahu betul kalau siamin ini dibuat untuk memudahkan masyarakat tanjungbalai mengurus dokumen dokumen penting, selain itu para pelaksana juga udh di latih dan punya panduan yang jelas tentang siamin jadi kami siap menjalankannya demi pelayanan terbaik untuk masyarakat”

Dapat disimpulkan bahwa para pelaksana di dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota tanjung balai sudah sangat paham dengan tujuan kebijakan siamin, Tujuan kebijakan SIAMIN sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan agar menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Para pelaksana menyadari bahwa program SIAMIN dirancang agar proses pelayanan tidak berbelit-belit, data penduduk menjadi lebih

tepat, dan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih efisien. Mereka menilai bahwa tujuan kebijakan ini sudah disampaikan dengan cukup rinci.

Dengan demikian, para pelaksana Dukcapil Kota Tanjung Balai yakin bahwa program SIAMIN benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, membantu pemerintah menyediakan data kependudukan yang lebih akurat, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Mereka berkomitmen untuk terus bekerja sama dan meningkatkan pelayanan, agar masyarakat Tanjung Balai merasa terbantu dan puas dengan layanan yang disediakan oleh Dukcapil

2. Sumber Daya

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menggunakan sumber daya yang ada. Seperti yang kita ketahui, ada banyak jenis sumber daya yang penting. Namun dalam hal ini manusia adalah sumber daya yang paling penting. Ini karena manusia berperan sebagai pelaksana dan penggerak utama kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ferawati, SE selaku analisis kebijakan ahli muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa :

“tantangan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya manusia yang tersedia belum memadai untuk mendukung program ini, karena memang harus membutuhkan orang yang mengerti di bidang komputer.

Selain itu karena banyak nya kesibukan juga menjadi kendala, karena pelayanan administrasi kependudukan membutuhkan tenaga yang terampil dan memadai. Kami berupaya mengatasinya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan kolaborasi antarbidang, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Meskipun begitu. Tantangan ini tetap menjadi perhatian kami agar layanan tetap berjalan dengan baik.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Nenry Ratika Syari, SH.M.AP selaku analisis kebijakan ahli muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa :

“secara umum, anggaran, SDM, dan infrastruktur cukup memadai untuk tahap awal ini. Untuk tahap pengembangan kita membutuhkan pembangunan sistem yang lebih lanjut lagi untuk SDM agar lebih terampil dalam mengoperasikan aplikasi SIAMIN. Sementara itu infrastruktur pendukung, seperti jaringan dan perangkat komputer juga masih perlu ditingkatkan terutama di kantor-kantor pelayanan yang padat.”

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksana yang sudah memadai dan didukung pelatihan yang sesuai, sehingga pelaksanaan berjalan lancar. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi, serta kesibukan yang mempengaruhi ketersediaan tenaga terampil.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, diketahui bahwa proses

komunikasi dan kordinasi antar lembaga yang terlibat berjalan dengan baik. Bentuk komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, dan media digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak herlin, A.Md selaku administrator database di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data bahwa :

“kami menggunakan berbagai saluran untuk menyampaikan program SIAMIN, seperti media sosial, website dan juga bantuan dari lurah. Respons masyarakat cukup baik meskipun masih ada yang perlu di bimbing langsung kami sudah mempraktekkan secara langsung kepada masyarakat pengguna dan itu sudah berhasil sampai dokumen nya selesai. dari beberapa masyarakat mudah memahaminya hanya sosialisasi nya aja yang perlu di perbanyak.”

Tambahan wawancara yang dilakukan dengan ibu Neny Ratika Syari, SH.M.AP selaku analisis kebijakan ahli muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa :

“Kami sadar bahwa tidak semua masyarakat familiar dengan sistem digital. Oleh karena itu kami buat materi sosialisasi yang sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta contoh langsung bagaimana menggunakan aplikasi atau mengakses layanan SI AMIN.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Tuti Rahayu Zubir, SKM selaku lurah selat lancang :

“Tantangan utamanya adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari program SI AMIN apalagi yang belum terbiasa dengan sistem digital disisi lain tidak semua pelaksana memiliki waktu dan kapasitas yang cukup untuk menjelaskan secara rinci satu per satu kepada

masyarakat jadi, kadang ada informasi yang tidak tersampaikan dengan maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana program si amin dapat disimpulkan bahwa upaya informasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi. Respon masyarakat terhadap program ini secara umum cukup baik, meski demikian tantangan masih ditemukan dalam hal penyampain informasi yang tidak merata, tidak semua masyarakat familiar dengan sistem berbasis digital sehingga perlu strategi sosialisasi yang lebih sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah di pahami. Selain itu keterbatasan waktu dan kapasitas pelaksana dalam menjelaskan secara persomal kepada setiap warga menjadi kendala tersendiri. Hal ini menyebabkan tidak seluruh informasi dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu meskipun program SI AMIN sudah berjalan dan mendapat respom positif, intensitas dan metode sosialisasi perlu di tingkatkan. Materi komunikasi yang mudah dipahami dan pendekatan langsung yang lebih ;uas menjadi kunci agar seluruh masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital dengan lebih optimal.

4. Krakteristik agen pelaksana

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari krakteristik agen pelaksana kebijakan. Dalam konteks pelaksanaa program SI AMIN di kota tanjungbalai agen pelaksana mencakup aparatur dinas kependudukan dan pencatatn sipil, kelurahan serta operator layanan

yang terlibat langsung dalam proses pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan karakteristik agen pelaksana program SIAMIN di kota tanjungbalai menunjukkan tingkat kompetensi yang cukup baik. Sebagian besar pelaksana telah mengikuti pelatihan teknis serta bimbingan teknis terkait penggunaan sistem informasi dan prosedur pelayanan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak herlin, A.Md selaku administrator database di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data bahwa :

“kami menjalankan program SI AMIN berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan oleh pusat maupun daerah. SOP ini kami jadikan acuan mulai dari proses pelayanan. Input data, verifikasi, hingga pencetakan dokumen kependudukan. Jadi semua pelaksana sudah tau alurnya seperti apa”

5. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan publik. Dalam pelaksanaan program SI AMIN di kota tanjungbalai ketiga aspek tersebut turut memberikan dampak terhadap proses, dinamika, serta hasil kebijakan di lapangan.

Dalam konteks sosial, tingkat pendidikan, pemahaman digital, dan budaya masyarakat punya pengaruh besar terhadap seberapa baik warga memahami dan ikut berpartisipasi dalam program SIAMIN. Masyarakat dengan latar belakang sosial yang berbeda akan beradaptasi dengan teknologi informasi secara bervariasi. Ini jadi tantangan bagi para pelaksana untuk menyampaikan informasi dan membimbing warga agar bisa mengakses layanan secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herlin, A.Md selaku Administrator Database di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data bahwa :

“sangat dibutuhkan dukungan sosial untuk efektivitas penggunaan aplikasi SIAMIN, karena dengan banyaknya dukungan dari sosial masyarakat itu sangat mendukung supaya masyarakat tertarik dengan aplikasi SIAMIN, kalau masyarakat dan lingkungan mendukung pelaksanaan program jauh lebih mudah. Mereka ikut menyampaikan informasi ketetangganya bahkan membantu menjelaskan cara akses SIAMIN kepada yang belum paham.”

Dukungan sosial dari masyarakat adalah elemen penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk program SIAMIN di kota tanjungbalai. Berdasarkan wawancara dengan pelaksana dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, ada beberapa strategi yang mereka gunakan untuk membangun dan mempertahankan dukungan sosial masyarakat. Para pelaksana memahami bahwa penerimaan masyarakat kebijakan sangat bergantung pada tingkat

pehamaman, kepercayaan, dan kedekatan anatar pelaksana dengan warga. Karena itu, pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tapi juga komunikatif dan partisipatif.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Neny Ratika Syari, SH.M.AP selaku analisis kebijakan ahli muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa :

“untuk mempertahankan dukungan sosial kami harus menjaga kondisi sistem agar tetap berjalan normal dan memberikan pelayanan prima serta tidak mengecewakan masyarakat dan ketika ada kendala atau gangguan kami berikan layanan pengaduan bisa melalui nomor WhatsApp dan bisa langsung datang ke kantor.”

Tambahan wawancara yang dilakukan dengan ibu Ferawati, SE selaku analisis kebijakan ahli muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa :

“kalau pelayanan kita baik, masyarakat akan percaya dan mendukung. Makanya kami berusaha terus konsisten menjaga kualitas layanan dan terbuka dengan saran atau kritik”

Dapat di simpulkan bahwa dukungan sosial masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIAMIN. Partisipasi masyarakat dapat membantu dalam menyebarkan informasi tentang program SIAMIN lebih luas. Dalam mempertahankan dukungan sosial pelaksana harus menjaga kualitas layanan. Pelayanan yang terbuka terhadap masukan dan tidak mengecewakan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan serta memperkuat dukungan sosial terhadap keberlangsungan kebijakan.

6. Sikap dan Komitmen Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjung balai, diketahui bahwa pelaksana menunjukkan sikap yang proaktif, ramah dan terbuka terhadap kebutuhan masyarakat. Pemahaman pelaksana terhadap sistem dan fungsi-fungsi program SIAMIN menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herlin, A.Md selaku Administrator Database di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data bahwa :

“para pelaksana sangat memahami bagaimana sistem SIAMIN bekerja, mulai dari proses input data, validasi, sampai penerbitan dokumen. Fitur-fiturnya juga familiar karena kami sering menggunakan dan dilatih secara bertahap”

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Neny Ratika Syari, SH.M.AP selaku analisis kebijakan ahli muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa :

“kalau para pelaksana sudah memahami sistem pelayanan akan bisa lebih cepat, tidak banyak kesalahan dan masyarakat akan lebih puas. Jadi memang pemahaman para pelaksana sangat menentukan keberhasilan program ini”

Pemahaman yang mendalam oleh para pelaksana sangat berkontribusi dalam peningkatan kecepatan pelayanan, minimnya kesalahan, serta kepuasan masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program SIAMIN.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan 5 narasumber, diantaranya 3 orang dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjungbalai, 1 orang lurah selat lancang dan 1 orang masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa para narasumber sudah memahami peraturan walikota nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan program SIAMIN DUKCAPIL di Kota Tanjungbalai.

Adapun indikator dari implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan program SIAMIN DUKCAPIL di Kota Tanjungbalai adalah standar dan tujuan kebijakan yang mengacu pada BAB III pasal 5 bagian kesatu tujuan. Dalam pasal 5 menegaskan bahwa peraturan walikota ini bertujuan untuk memberikan layanan alternatif, memberikan kemudahan dalam pemberian layanan di era teknologi, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, membangun kesadaran tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Dari hasil penelitian yang di peroleh, implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2020 berdasarkan standar dan tujuan kebijakan, yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjung balai menunjukkan bahwa para pelaksana telah memahami secara jelas arah, tujuan, dan standar operasional yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjung balai telah menetapkan pedoman teknis dan operasional untuk pelaksanaan SIAMIN, mencakup standar waktu pelayanan, prosedur data, dan mekanisme penerbitan dokumen.

Selanjutnya indikator sumber daya merupakan komponen penting dalam proses keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksana program SIAMIN secara umum telah memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, dari sisi sumber daya teknologi dan infrastruktur, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjungbalai telah dilengkapi dengan perangkat keras dan lunak yang mendukung operasional sistem SIAMIN. Namun demikian, beberapa pelaksana menyebutkan adanya tantangan terkait keterbatasan perangkat yang tidak merata di seluruh unit layanan.

Secara keseluruhan, implementasi program SIAMIN didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, meskipun masih terkendala pada sarana dan prasarana teknis. Oleh karena itu penguatan sumber daya secara menyeluruh mencakup kapasitas sumber daya manusia, kecukupan anggaran, dan ketersediaan infrastruktur teknologi sangat penting untuk mengoptimalkan program.

Komunikasi antar organisasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan suatu kebijakan, komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjung balai berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi internal dalam lingkungan dinas kependudukan pencatatan sipil kota tanjung balai telah berjalan secara intensif , dikoordinasikan secara rutin melalui rapat mingguan, briefing harian, dan grup WhatsApp. Selain komunikasi internal, pelaksanaan

program SIAMIN juga melibatkan komunikasi eksternal antar instansi. Ini menegaskan bahwa komunikasi yang jelas dan responsif sangat penting dalam implementasi kebijakan publik berbasis sistem informasi. Karenanya, mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur dan sistematis dibutuhkan untuk kelancaran informasi lintas instansi dan penguatan kerja sama antar organisasi demi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi.

Berikutnya karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pelaksana memiliki karakteristik kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tanjungbalai terstruktur dalam bidang-bidang kerja yang memudahkan koordinasi dan pelaksanaan teknis.

Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi program SIAMIN di Kota Tanjungbalai cukup memadai berkat struktur, pemahaman tugas, dan pelatihan. Namun, penguatan kapasitas kelembagaan khususnya penambahan personel dan manajemen beban kerja tetap penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelayanan.

Lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, politik, ekonomi ini sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian kombinasi lingkungan sosial yang responsif, dukungan politik yang kuat, dan kemampuan ekonomi daerah yang memadai merupakan faktor eksternal penentu keberhasilan implementasi

program SIAMIN di Kota Tanjungbalai. Meski ada tantangan terkait literasi digital masyarakat dan keterbatasan fiskal, ketiga aspek ini secara umum menciptakan iklim kondusif untuk berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan digital.

Kemudian sikap dan komitmen pelaksana merupakan salah satu faktor internal yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan, berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana menunjukkan sikap positif dan antusias terhadap SIAMIN, menganggapnya inovasi penting untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Mereka juga memahami perannya sebagai ujung tombak layanan publik yang dituntut bekerja cepat, akurat, dan ramah. Dari aspek komitmen mayoritas pelaksana menunjukkan loyalitas dan konsistensi terhadap implementasi program. Beberapa pelaksana bahkan berkontribusi dalam memberikan masukan untuk pengembangan fitur SIAMIN, guna menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. Namun terdapat pula beberapa tantangan yang memengaruhi tingkat komitmen seperti beban kerja yang tinggi, keterbatasan tenaga, serta tekanan masyarakat dalam situasi pelayanan yang padat. Meskipun demikian pelaksana tetap menunjukkan upaya untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan program SIAMIN (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai telah diterapkan dengan cukup efektif dan menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, masih kurangnya sosialisasi tentang penggunaan program aplikasi SIAMIN kepada masyarakat.

Penerapan program SIAMIN berjalan sesuai tujuan awal kebijakan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, transparan, dan berbasis digital. Para pelaksana juga memahami sistem dengan baik. Mulai dari input data, validasi, hingga penerbitan dokumen.

Dalam hal implementasi SIAMIN dilaksanakan dengan pedoman dan arahan yang jelas, memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun perlu penambahan waktu kerja dan kelengkapan sarana dan prasarana agar operasional sistem berjalan dengan optimal. Komunikasi antar organisasi baik secara vertikal maupun horizontal sudah berjalan dengan cukup baik di lingkungan internal dinas, tapi koordinasi lintas instansi, khususnya dengan kelurahan dan instansi pusat masih perlu

di tingkatkan guna mendukung sinkronisasi dan integritas data kependudukan.

Secara kelembagaan, struktur organisasi pelaksana fungsional dengan pembagian tugas yang jelas dukungan eksternal seperti masyarakat yang adaptif terhadap layanan digital, dukungan politih pemerintah daerah, dan alokasi anggaran yang memadai turut menyukseskan program ini selain itu sikap dan komitmen pelaksana yang bertanggung jawab, mau belajar, beradaptasi, dan semangat melayani masyarakat juga berperan besar. Singkatnya, implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2020 tentang SIAMIN di kota Tanjungbalai cukup efektif dan berdampak positif pada pelayanan publik. Perbaikan dan penguatan aspek teknis serta koordinasi masih di perlukan untuk hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berikut beberapa saran yang di harapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi program SIAMIN di Kota Tanjungbalai:

1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tanjungbalai perlu mengevaluasi dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan server. Ini penting agar proses pelayanan SIAMIN lebih lancar dan optimal, terutama di unit pelayanan yang fasilitasnya masih terbatas.
2. Peningkatan sumber daya manusia, pemerintaj Kota Tanjungbalai melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil perlu menambah

jumlah tenaga pelaksana. Prioritaskan penambahan ini di bidang-bidang dengan beban kerja tinggi. Selain itu, distribusikan tenaga secara merata sesuai kebutuhan unit pelayanan untuk menghindari ketimpangan dalam pelaksanaan tugas.

3. Perlu adanya penguatan komunikasi dan koordinasi antar instansi ini termasuk dengan kelurahan, kecamatan, serta instansi lainnya. Tujuannya adalah agar sinkronisasi data kependudukan dan pembaruan sistem bisa dilakukan dengan cepat, akurat, dan terintegrasi.
4. Peningkatan literasi digital masyarakat, mengingat sebagian masyarakat belum terbiasa dengan layanan digital, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengakses layanan kependudukan melalui SIAMIN
5. Sistem SIAMIN perlu terus dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan teknologi. Pengembangan ini bisa mencakup penambahan fitur, peningkatan keamanan, serta pemantau performa sistem secara rutin.
6. Penguatan komitmen dan motivasi pelaksana, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pelaksana. Selain itu, memberikan penghargaan bagi mereka yang berkinerja baik bertujuan untuk menjaga motivasi dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas

DAFTAR PUSTAKA

- A, Y., Daicy, F., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), 1–8.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100.
<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Ananta, A., & Syamsir. (2019). Jurnal Ilmu Administrasi Publik. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*, 2(2), 1–12.
- Duval, R. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). *Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática*, 13(1), 1689–1699.
- Fajarwati, A., & Rahmadilla, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. *Dialog*, 7(1), 123–133.
- Gumay, A. S. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan (Studi Kasus Di Kota Samarinda). *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 115.
<https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5053>
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Kholif, K. I., Noor, I., & Siswidiyanto. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 709–714.
- Larasati, A. D. A., & Hartono, S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA JAWA TIMUR. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(3), 31–40.
- Moleong, L. (2006). Metode Penelitian. *Raden Fatah.Ac.Id*, 1–23.
<https://repository.radenfatah.ac.id/19077/3/3.pdf>

- Pandoh, M., Rumapea, P., & ... (2015). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) pada Sdn di Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/7749>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/7749/7314>
- RENNI, F. (2014). *PERAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA SUMATERA BARAT*. Universitas Andalas.
- Sudiyono, S. P. (2021). *Metode Diskusi Kelompok dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP*. Penerbit Adab.
- Utara, L., & Minahasa, K. (2018). *Issn : 2337 - 5736. I.*

5/5/20
A
Kc Dap Wm

DRAFT WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN PROGRAM SI AMIN DUKCAPIL
DI KOTA TANJUNG BALAI

I. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :
Umur :
Jabatan :

II. DAFTAR PERTANYAAN

a. Adanya tujuan yang jelas dan terukur agar dapat di pahami dengan baik oleh para pelaksana.

1. Se jauh mana para pelaksana mengetahui tujuan kebijakan tentang SI AMIN?
2. Bagaimana komunikasi yang efektif dapat membantu para pelaksana memahami tujuan yang telah ditetapkan?
3. Apakah menurut para pelaksana tujuan tersebut jelas dan terukur?

b. Adanya sumber daya yang mencakup anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang memadai.

1. Bagaimana kualitas para pelaksana dalam mendukung keberhasilan kebijakan?
2. Apa saja tantangan yang di hadapi terkait keterbatasan sumber daya?
3. Apakah sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang disediakan cukup untuk menjalankan kebijakan SI AMIN ini?

c. Adanya komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat yang harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman

1. Seberapa efektif saluran komunikasi yang ada dalam menyampaikan program SIAMIN DUKCAPIL kepada masyarakat?
2. Bagaimana cara memastikan bahwa informasi tentang program SI AMIN yang di berikan kepada masyarakat mudah di pahami?

3. Apakah ada tantangan dalam menyampaikan program SI AMIN baik antara pelaksana dan masyarakat?
- d. **Adanya karakteristik organisasi pelaksana untuk menilai kapasitas, struktur, dan prosedur organisasi dalam mendukung implementasi kebijakan**
 1. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan?
 2. Apa yang perlu ditingkatkan dalam karakteristik organisasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif?
 3. Bagaimana struktur organisasi di DUKCAPIL mendukung pelaksanaan kebijakan ini?
- e. **Adanya dukungan sosial yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan.**
 1. Se jauh mana dukungan sosial mempengaruhi efektivitas kebijakan SI AMIN DUKCAPIL?
 2. Bagaimana cara para pelaksana membangun dan mempertahankan dukungan sosial untuk kebijakan yang di terapkan?
 3. Apa saja bentuk dukungan sosial yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan SI AMIN DUKCAPIL?
- f. **Adanya pemahaman dan kesiapan aparatur dalam melaksanakan kebijakan sangat menentukan keberhasilannya**
 1. Se jauh mana para pelaksana memahami system program SI AMIN DUKCAPIL dan fungsi-fungsi nya?
 2. Apakah ada pelatihan khusus mengenai penggunaan system program SI AMIN
 3. Apakah pemahaman pelaksana dalam penggunaan system SI AMIN berpengaruh dalam keberhasilan kebijakan?

Demikianlah draft wawancara ini dibuat sebagai indikator dan parameter peneliti dalam mencari informasi di lapangan, yang akan di sampaikan pada pihak terkait di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjung balai dengan maksud untuk memenuhi kelengkapan data terkait judul penelitian

yaitu implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan
program SI AMIN DUKCAPIL di kota tanjung balai

Medan, 19 Februari 2025

Hormat Saya

Peneliti



(Tiara Panjaitan)

2103100017



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Adressasi Unggul Berprestasi Rangsang Budan Produktif Nasional Perguruan Tinggi No. 1943/UMSU/PTIAK-KPPT/2023
 Pusat Administrasi Jalan Muhtar Sani No. 2 Medan 20230 Telp. (061) 822490 - 822491 Fax. (061) 822471 - 822493
 @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu,
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 15 November 2024

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Tiara Panjaitan
 NPM : 2103100017
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,63

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2010 tentang Penerapan Program administrasi pemerintahan Si Amin Dukung Di Kota Tanjung Balai	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi Peraturan daerah kota tanjung balai nomor 04 tahun 2019 tentang perundangan dan pengelolaan lingkungan hidup	
3	Implementasi Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2002 tentang larangan gelandangan dan pengemis di kota medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas bebas SPP tahap berjalan;
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 15 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(ANANDA MAHARDIKA M.S.SOS.MSP)
 NIDN: 0122118801

Pemohon,

[Signature]
 (TIARA PANJAITAN)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi.....

(ABUNG SAPUTRA M.AP)
 NIDN: 010018303

(OK) ps. Agung Saputra S.Sos M.AP





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAA/KP/PT/01/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622408 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6631083
<http://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2081/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 15 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **TIARA PANJAITAN**
 N P M : 2103100017
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM SI AMIN DUKCAPIL DI KOTA TANJUNG BALAI**

Pembimbing : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.A.P.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 042.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 17 Djumadil Awwal 1446 H
 19 November 2024 M

Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIYATI SALEH, MSP.
 NIDN. 0030017402

- Terselenggara:
1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
 2. Pembimbing ybs. di Medan;
 3. Peringat.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi website kita di: www.umsu.ac.id
untuk informasi lebih lanjut

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAK-PT/AAK/KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622496 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6621083
Email: info@umsu.ac.id * fmip@umsu.ac.id * umsu@umsu.ac.id * umsu@umsu.ac.id * umsu@umsu.ac.id * umsu@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 15 Januari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TIARA PANJAITAN
NPM : 2103100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah), Nomor: 2081.../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 15 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM SIAMIN DUKCAPIL
DI KOTA TANJUNG BALAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Penetapan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s.d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Petinjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

Menyetujui

Pembimbing

Pemohon,

(Ananda Mahadika, S.Sos.MSP, Agung Saputra, S.Sos.M, Tiara Panjaitan)

NIDN: 0122118301

NIDN: 0120018303



5X4



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Namar : 150/LUND/II.3 ALUMSU-03/F/2025

Program Studi	Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal	Jumat, 17 Januari 2025
Waktu	08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR FOKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PENEMBAING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	DIMAS ANDHIKA SEBAYANG	2103100071	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI COORDINATING DINAS SORABER DALAM OPTIMALISASI PENATAAN KABEL UDARA DI WILAYAH KOTA MEZAN
2	SINDY ADELLA	2103100030	BYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM PEMBERANTAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
3	RISDAYU HAPSAH	2103100061	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI ORGANSIZING DALAM PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEKUTERA (UPPIK) DI KECAMATAN BERINCON KABUPATEN DELI SERDANG
4	TIARA PANJUNTAN	2103100017	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PERSEBARAN PROGRAM SI AMN DUKCAPIL DI KOTA TALLULUNG BULAI
5	ARIA HESTI WINDANI	2103100027	RAFEDAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA DINAS PENERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN ABGASI PANTAI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17A/SK/BAK-PTIAK/PgP/PT/20234
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 806/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 07 Dzulqaidah 1446 H
05 Mei 2025 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Tanjung Balai
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, atas nama :

Nama mahasiswa	: TIARA PANJAITAN
N P M	: 2103100017
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM SI AMIN DUKCAPIL DI KOTA TANJUNG BALAI

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan


Dr. ARIFIN SILEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No. 107 Telp/Fax. 0623 - 93118
TANJUNGBALAI

21368

Tanjungbalai, 10 Mei 2025

Yth. Kepala BAPPERIDA Kota Tanjungbalai

di -

Kota Tanjungbalai

REKOMENDASI

NOMOR : 070 / 142 / Bakesbangpol/2025

Menunjuk surat:

Dari : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Nomor : 806/KET/ILJ.AU/UMSU-03/F/2025
 Tanggal : 05 Mei 2025
 Perihal : "Izin Penelitian"

Sesuai dengan surat yang diajukan dan setelah dipelajari, maka dapat diberikan izin Penelitian kepada :

Nama : TIARA PANJAITAN
 Npm : 2103100017
 Prodi : Ilmu Administrasi Publik
 Lokasi Penelitian : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
 Judul : "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Program Si AMIN DUKCAPIL di Kota Tanjungbalai".

Demikian diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA TANJUNGBALAI

SEKRETARIS

SOFIAN-POHAN, SH
PEMBINA TKJ
 NIP. 197504141995031001

Tembusan:

- Walikota Tanjungbalai (sebagai laporan)
- Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
Riset dan Inovasi Daerah
 JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM 5,5 Email : bapperida@tanjungbalaikota.go.id
TANJUNGBALAI – 21361

IZIN PENELITIAN

Nomor : 000.9.6.1/0931/Bapperida/2025

- Membaca** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungbalai Nomor 070/ 352 /Bakesbangpol/2025 tentang Rekomendasi tanggal 9 Mei 2025.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 5. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2015 tentang izin pelaksanaan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan di kota Tanjungbalai.
- Menyatakan** : **Diizinkan** untuk melakukan kegiatan Penelitian kepada:
- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : TIARA PANJAITAN |
| NIM | : 2103100017 |
| Instansi | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Alamat Instansi | : Jl Mukhtar Basri No.3 Medan |
| Judul Penelitian | : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Program SI AMIN DUKATPIL di Kota Tanjungbalai . |
| Lokasi Penelitian | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai |
| Lama Penelitian | : 3 (tiga) Bulan |
| Penanggungjawab | : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |

Untuk hal ini kami tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian dimaksud dengan ketentuan:

- Selama Penelitian harus memberi laporan;
- Sesudah Penelitian berakhir untuk meninggalkan daerah diwajibkan menyampaikan hasil Penelitiannya kepada Bapperida Kota Tanjungbalai;
- Izin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- Waktu Penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat izin ini kembali;
- Bila hasil Penelitian tidak disampaikan maka merupakan penilaian negatif bagi Lembaga bersangkutan; Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Penelitian tidak memenuhi ketentuan;
- Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Penelitian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tanjungbalai
 Pada Tanggal : 9 Mei 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

\$

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 RISET DAN INOVASI DAERAH
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
ZUL ABDIMAN, S.Kom, MM.
 NIP : 19741228 200002 1 003

* UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E

*Dokumen ini dapat diunduh melalui QR Code



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANJUNGBALAI**

Jalan M. T. Haryono Nomor 64 Kota Tanjungbalai 21311 Telepon 082275480304

Tanjungbalai, 06 Juni 2025

Nomor : 800 / ~~000~~ /DUKCAPIL/VI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

di-

MEDAN

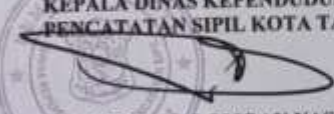
Sehubungan dengan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 000.9.6.1/0931/Bapperida/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa permintaan Izin Penelitian atas nama:

Nama : TIARA PANJAITAN
NIM : 2103100017
Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
Alamat Instansi : Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Si AMIN DUKCAPIL di Kota Tanjungbalai
Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
Lama Penelitian : 3 (tiga) Bulan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

Disetujui dengan ketentuan bahwasanya yang bersangkutan selama melakukan kegiatan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan mengikuti sistem kerja yang berlaku, berkelakuan baik, dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Institusi.

Selanjutnya diharapkan yang bersangkutan menyampaikan hasil Penelitiannya kepada Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya dilaksanakan, terima kasih.


**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI**

Drs. INDRA HALOMOAN NASUTION, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199402 1 001


MAJELIS PENGENDIAN TINGKAT PEMERITUKAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN
Terletak di A. Sidiyasa, Kawasan Perumahan Terminal Republik Indonesia No. 00015, L.P.P. 2014
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten M. S. S. Medan 20128 Telp. (061) 66214867
 Web : www.umhu.ac.id E-mail : perpustakaan@umhu.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 01931/KETAL 7-AU/UMSU-PM/2025



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama	: TIARA PANJAITAN
NPM	: 2103100017
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi	: Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Medan, 11 Muharram 1447 H
 06 Juli 2025 M
 Kepala Perpustakaan,

 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MATILIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 101/JORISAN-PTIAA/KPPT/TKU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Beusi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623401 - 66234067 Fax. (061) 6625474 - 6621603
<https://fkip.umsumu.ac.id> fkip@umsumu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA AKAKA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : TIARA PANJAITAN
 NPM : 210310017
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Implementasi Peraturan Walikota nomor 39
 Tahun 2020 tentang Penerapan Program
 SI AMN Berbasis Di Kota Tanjung Balai

No.	Tanggal	Kegiatan/Akuis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18/01/2024	Bimbingan Pendahuluan Judul	
2.	19/01/2024	Bimbingan Bab I, II dan Bab III	
3.	15/01/2024	Revisi Bab I, II dan III	
4.	16/01/2024	Acc Bab I, II dan III	
5.	19/01/2024	Bimbingan Draft wawancara	
6.	30/01/2024	Bimbingan Bab IV dan V	
7.	01/02/2024	Revisi bab IV dan V	
8.	01/02/2024	Bimbingan Bab V	
9.	04/02/2024	Acc tugas akhir skripsi	

Medan, 04.07.2025



Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(Ananda Mahendira S.Sos, M.S.P)
 NIDN: 012118801

(Ananda Mahendira S.Sos, M.S.P)
 NIDN: 012118801

(Asung Saputra S.Sos, M.AP)
 NIDN: 0120018303



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SERPIS DAN JURNAL UJIAN)

Nomor : 1494/UNDIL.3.AUL/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2025
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU LT. 2



SL-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TMT PENGULI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGULI I	PENGULI II	PENGULI III	
1	ATYAYA CHAFIA SYAHIRAH	2103100021	Dr. JEHAN RHOHO IZYAHSYAH, S.Soc., M.Si	SYAFRUDIN, S.Soc. MH S.Soc., M.SP	ANANDA MAHAROKA, S.Soc., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERAN WAWAKILAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN
2	RIYADI	2103100065	ANANDA MAHAROKA, S.Soc., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Soc. M.AP.	SYAFRUDIN, S.Soc. MH S.Soc., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN Hutan ADS DI KOTA MEDAN
3	MUSADDADU KHAFIL AZMI	2103100038	Dr. JEHAN RHOHO IZYAHSYAH, S.Soc., M.Si	SYAFRUDIN, S.Soc. MH S.Soc., M.SP	ANANDA MAHAROKA, S.Soc., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMERINTAHAN KEMERDEKAAN ANGGARAN UMUM DI KOTA MEDAN
4	DEBI MAHYUNI PUTRI	2103100051	ANANDA MAHAROKA, S.Soc., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Soc. M.AP.	Dr. JEHAN RHOHO IZYAHSYAH, S.Soc., M.Si	EFFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING DISOLUCIPIL DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN KEPERILIKAH: JARU TANDA PENGODUK ELEKTRONIK (TTP-E) DI KABUPATEN SINGULUE
5	TARA PAULINTAI	2103100017	IDA MARTINELY, SH, MH	SYAFRUDIN, S.Soc. MH M.AP.	AGUNG SAPUTRA, S.Soc. M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MAI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENCAPAIAN PROGRAM SI AMIN DISOLUCIPIL DI KOTA TANGKUNG BALAI

Notulis: Syarif:

Medan, 03 Rabul Awwal 1447 H
 26 Agustus 2025M



Assec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.



Assec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.





JAPK
(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURUSAN KAJI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS HUKUM, SOSIAL, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Tiara Panjaitan

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Program SLAMIN Dukcapil di Kota Tanjung Balai"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, August 22, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umssu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

DOKUMENTASI

Keterangan : Wawancara Dengan Staff Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Tiara Panjaitan
NPM : 2103100017
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 06 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : JL. Mesjid Nuruddin Dusun II Bagan Asahan Pekan
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

DATA ORANG TUA

Ayah : Saprun Panjaitan
Ibu : Nurainun
Alamat : JL. Mesjid Nuruddin Dusun II Bagan Asahan Pekan

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2009-2015 : SD SWASTA "TULIS"
2. 2015-2018 : MTS. Muhammadiyah Sei Apung Jaya
3. 2018-2021 : SMA Negeri 1 Tanjung Balai - Asahan
4. 2021-2025 : Strata-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 21 Agustus 2025


Tiara Panjaitan